



**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA
PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA WISATA KERTOSARI**

TESIS

OLEH

LAILY ROCHMATIN

22002091011



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

NOVEMBER 2022



**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA
PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA WISATA KERTOSARI**

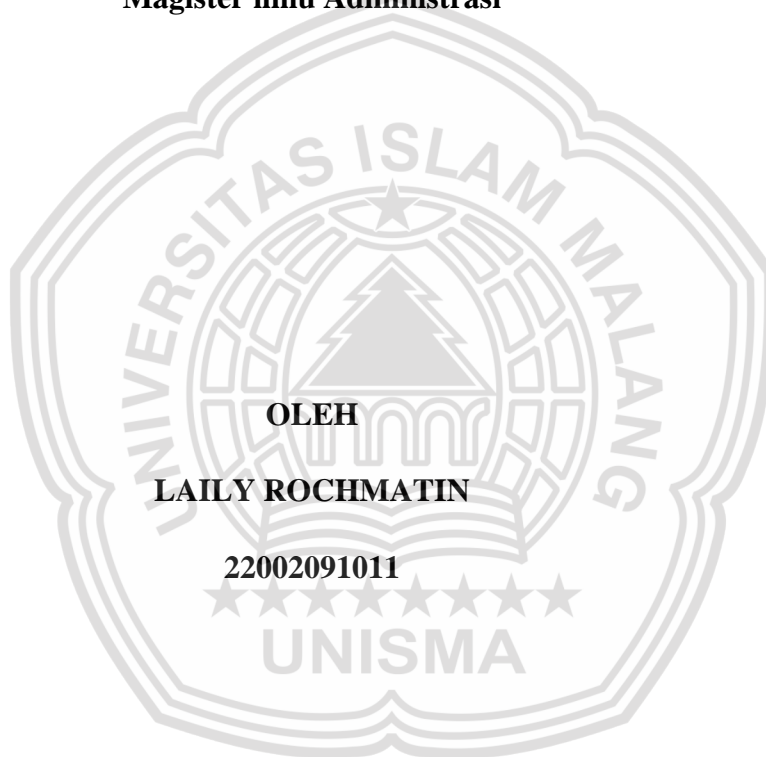
TESIS

Diajukan kepada

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan memperoleh gelar

Magister ilmu Administrasi



OLEH

LAILY ROCHMATIN

22002091011



UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

NOVEMBER 2022

ABSTRAK

Laily Rochmatin. Npm 201669080010. 2022. Tesis berjudul **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA WISATA KERTOSARI**. Diajukan kepada UNIVERSITAS ISLAM MALANG Untuk memenuhi Sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister ilmu Administrasi Publik (M. A.P) di UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA). Pembimbing utama Dr. H. Slamet Muchsin, M. Si dan pembimbing pendamping Dr. Sunariyanto, S.Sos., MM.

Latar belakang dari penelitian ini adalah terkait dengan kondisi Desa Wisata Kertosari setelah pandemi yang eksistensinya masih terjaga meskipun sempat ditutup akibat dampak pandemi. Kunjungan wisatawan tercatat sebesar enam ratus tiga puluh empat wisatawan dari bulan Agustus hingga Desember 2020 setelah PPKM dicabut. Eksistensi tersebut dapat bertahan karena proses collaborative governance yang dilakukan sehingga menarik untuk ditelaah lebih dalam.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah (1) Memberikan hasil Analisa dan deskripsi efektivitas dari collaborative governance dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di Desa Kertosari. (2) Mendeskripsikan peran seluruh stakeholder dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di Desa Kertosari. (3) Menganalisa strategi sekaligus faktor pendukung keberhasilan tata Kelola pariwisata berkelanjutan melalui *collaborative governance* di Desa Kertosari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang membutuhkan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara analisis atau konsep secara mendalam mengenai hubungan-hubungan konsep yang dikaji secara empirik. Adapun pengumpulan data menggunakan beberapa metode seperti ; (a) observasi (b) wawancara (c) dokumentasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan tiga Langkah kegiatan yaitu ; reduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini adalah ; (1) collaborative governance di Desa Wisata Kertosari dapat dikatakan baik dan efektif karena telah melalui seluruh tahapan collaborative governance yang disebutkan oleh Ansell dan Gash seperti kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. (2) peran stakeholder yang terlibat dalam Desa Wisata Kertosari sudah sesuai peran dan fungsinya meliputi (a) Pokdarwis Randuwana dengan peranan sebagai koordinator, fasilitator, implementer, akselerator. (b) Masyarakat Desa Kertosari sebagai implementer (c) pemerintah Desa Kertosari sebagai koordinator dan fasilitator (d) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan sebagai policy creator, coordinator, fasilitator, dan implementer. (3) Strategi sekaligus faktor pendukung keberhasilan tata Kelola pariwisata Desa Wisata Kertosari melalui SWOT yaitu (a) *Streight-Opportunities* (SO) : membangun dan melengkapi kebutuhan pariwisata, meningkatkan even pariwisata, mengembangkan atraksi wisata. (b) *Weakness- Opportunities* (WO): Menggandeng pihak swasta, meningkatkan promosi wisata. (c) *Streight-Threats* (ST) : mengoptimalkan potensi alam dan keunikan Desa Wisata Kertosari, menggelar festival pagelaran budaya. (d) *Weakness-Threats* (WT) : Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melakukan pengawasan dan pemeliharaan fasilitas.

Kata kunci : collaborative governance, peran stakeholder, strategi tata Kelola

ABSTRACT

Laily Rochmatin. Npm 201669080010. 2022. Thesis entitled : COLLABORATIVE GOVERNANCE IN SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT IN KERTOSARI VILLAGE. Submitted as one of requirements to obtain a Master's degree in Public Administration (M. A.P) at the Islamic University of Malang (UNISMA). Main advisor Dr. H. Slamet Muchsin, M. and second advisor Dr. Sunariyanto, S.Sos., MM.

The background of this research is related to the condition of the Kertosari Tourism Village after the pandemic whose existence is still maintained even though there are indications of weak institutional capacity and top-down implementation is still being put forward. In addition to the Regulation of the Regent of Pasuruan No. 66 of 2021 concerning tourism which in detail mentions the existence of spatial planning for tourist villages that are not yet optimal, even though the function of spatial planning is to be the basis for the preparation of the village RPJM so that the village is not faced with environmental and natural resource problems later.

Therefore, the purpose of this study is (1) to provide analysis results and a description of the effectiveness of collaborative governance in sustainable tourism governance in Kertosari Village. (2) Describe the role of all stakeholders in sustainable tourism governance in Kertosari Village. (3) Analyzing strategies as well as supporting factors for the success of sustainable tourism governance through collaborative governance in Kertosari Village.

This study uses a qualitative research approach, namely research that requires a depth of appreciation of the interaction between analysis or concepts in depth regarding the relationships of concepts studied empirically. The data collection uses several methods such as; (a) observation (b) interview (c) documentation. The research data analysis technique uses three steps of activities, namely; data reduction, data display and data verification.

The results of this study are; (1) collaborative governance in Kertosari Tourism village can be said to be good and effective because it has gone through all the stages of collaborative governance mentioned by Ansell and Gash such as initial conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaboration processes. (2) the roles of stakeholders involved in Kertosari Tourism Village include (a) pokdarwis randuwana with roles as coordinator, facilitator, implementer, and accelerator. (b) Kertosari Village community as implementer (c) Kertosari Village government as coordinator and facilitator (d) Pasuruan Regency Tourism and Culture Office as policy creator, coordinator, facilitator, and implementer. (3) strategies as well as supporting factors for the success of Kertosari Tourism Village tourism management through SWOT, namely (a) Strength-Opportunities (SO): building and complementing tourism needs, increasing tourism events, developing tourist attractions. (b) Weakness-Opportunities (WO): Cooperating with the private sector, increasing tourism promotion. (c) Strength-Threats (ST): optimizing the natural potential and uniqueness of the Kertosari Tourism Village, holding a cultural performance festival. (d) Weakness-Threats (WT): Improving the quality of human resources, supervising and maintaining facilities.

Keywords: *collaborative governance, stakeholder role, governance strategy*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 mengadopsi standar *internasional dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC)* dengan harapan bahwa akan adanya peningkatan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan khususnya destinasi wisata pada tahun 2020. Konsep pariwisata berkelanjutan dipilih karena mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan seperti dari segi ekologi (*ecological sustainability*), sosial budaya (*social and cultural sustainability*) dan ekonomi yang berkelanjutan (*economy sustainability*) baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan wisata dengan memerhatikan minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat lokal dengan menjaga kestabilan lingkungan dalam pengelolaan wisata yang berorientasi pada jangka panjang. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan atau *sustainable development* adalah bagaimana memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan pada saat ini dengan tidak mengabaikan kemampuan generasi selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhannya.

Namun ditengah upaya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, Pariwisata menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak pandemi covid-19 secara signifikan. Di sepanjang tahun 2020, terjadi penurunan jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia, data di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat jumlah kunjungan wisatawan hanya berada diangka 4.052.923 atau mengalami penurunan sebesar 74,84% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 16.108.600 kunjungan.

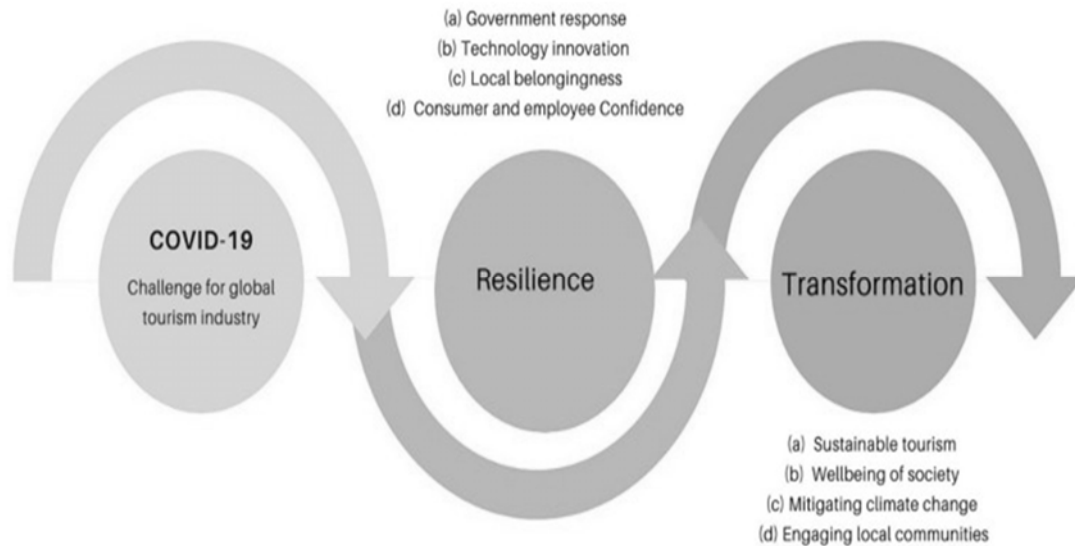
Untuk memulihkan kondisi perekonomian masyarakat di pedesaan selama masa pandemi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya mengoptimalkan potensi Desa agar lebih memberikan nilai tambah. Diantaranya dilakukan dengan mengembalikan performa konsep Desa Wisata yang hingga saat ini menjadi tiang penyangga perekonomian warga desa. Tidak terkecuali pemulihan pada Desa Wisata Kertosari yang merupakan rintisan desa wisata di Kabupaten Pasuruan. Selama pandemi berlangsung,

penutupan beragam destinasi wisata di Desa Kertosari dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat sekitar desa wisata.

Adapun sinyal pemulihan ekonomi Indonesia mulai terlihat pada paruh pertama 2021 ini. Data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Triwulan 2 tahun ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen (*year on year*). Meskipun pertumbuhan yang relatif tinggi ini secara teknis penghitungan disebabkan oleh *low base effect* yaitu kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun drastis di triwulan yang sama tahun sebelumnya (2020 - masa awal pandemi Covid-19), namun kinerja ekonomi yang sudah mulai membaik ini setidaknya bisa menjadi langkah awal percepatan pemulihan ekonomi ke depannya.

Hingga saat ini, kajian tentang pariwisata berkelanjutan dalam perspektif administrasi publik belum banyak dilakukan. Kerangka kerja manajemen pariwisata berkelanjutan yang tersedia di literatur Sebagian besar berisi daftar prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan beserta strategi pengembangannya (A.Yoeti, I made 2013). Sampai saat ini, masih sedikit kajian sistematis yang berdasarkan sistematis berdasarkan konsep administrasi publik dan teknik analisis untuk mencari format yang berpengaruh dalam tata Kelola pariwisata berkelanjutan, seperti efektifitas collaborative governance, peran stakeholder yang terlibat serta strategi tata Kelola pariwisata berkelanjutan melalui analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman (SWOT).

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Sharma, G.D., Thomas, A., & Paul, J. (2021) berjudul *Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework* yang dipublikasikan dalam Jurnal Tourism Management Perspectives Vol 37 Tahun 2021, menghasilkan sebuah kerangka kebijakan pemulihan pariwisata yang diberi nama *resilience-based framework*.



Gambar 1.1 : Kerangka berbasis ketahanan untuk tatanan ekonomi global baru (*Resilience-based framework for the new global economic order*) menurut Sharma, G.D., Thomas, A., & Paul, J. (2021)

Dalam gambar tersebut, Sharma, G.D., Thomas, A., & Paul, J memberikan jabaran terkait dengan kerangka kebijakan dalam upaya pemulihan pariwisata dimana pandemi Covid-19 dipandang sebagai sebuah tantangan global dan industri pariwisata harus mampu melakukan adaptasi dengan keadaan atau krisis ini.

Terdapat setidaknya empat faktor yang membuat industri pariwisata menjadi Tangguh (*resilience*) dalam konteks pemulihan ekonomi di masa maupun pascapandemi. Pertama, respons pemerintah yang merupakan faktor krusial dalam upaya penyelamatan semua industri tak terkecuali pariwisata. Pemberian stimulus kebijakan oleh pemerintah merupakan hal mendasar yang dijadikan pondasi dalam bangkitnya pariwisata. Indonesia sendiri bahkan sudah menggelontorkan hampir Rp 3,3 triliun pada 2020 guna pemulihan pariwisata nasional melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan akan dilanjutkan pada 2021 sebesar Rp 2 triliun untuk Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia. Juga stimulus sebesar Rp 400 miliar untuk program terkait pemberdayaan UMKM dan sektor pariwisata lokal.

Kedua, inovasi teknologi yang akan menjadikan pariwisata sebagai industri yang lebih fleksibel. Digitalisasi pariwisata khususnya pada masa pandemi harus sesegera mungkin dilakukan. Seperti penggunaan robot dalam menjamu wisatawan saat ini yang

dinilai bisa lebih mengurangi interaksi dimana sudah banyak diterapkan di berbagai negara lainya. Ketiga, kepemilikan lokal sebagai "penyelamat" industri pariwisata dimana rasa kepemilikan terus digaungkan kepada masyarakat seperti melakukan kerja bakti maupun kegiatan sosial lainnya sehingga dapat menambah kekuatan pemerintah dalam membangkitkan pariwisata.

Terakhir, kepercayaan konsumen dan pelaku pariwisata. Pandemi telah mengubah persepsi masyarakat terhadap industri pariwisata, salah satunya terkait layanan dan produknya. Sehingga konsumen pariwisata akan lebih *concern* terhadap aspek kesehatan dan keselamatan dari layanan dan produk yang ditawarkan industri ini. Sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability*) misalnya, akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih akomodasi maupun destinasi yang akan mereka kunjungi.

Melalui empat faktor tersebut, industri pariwisata perlu menunjukkan ketangguhannya melalui beberapa sisi. Adapun ketangguhan pariwisata bisa diwujudkan melalui tiga segmen yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan yakni segmen pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (*regulator*) dalam kegiatan pembangunan pariwisata. Segmen kedua yakni berasal dari swasta atau pelaku pasar yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaksana atau pengembang pariwisata dengan sumber daya, modal maupun jejaring yang dimilikinya. Masyarakat lokal merupakan segmen terakhir yang berperan sebagai tuan rumah (*host*) sekaligus memiliki kesempatan sesuai kemampuan yang dimilikinya dengan sumber daya yang dimiliki baik berupa budaya, adat maupun tradisi.

Mengingat pentingnya peran dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka pelaksanaan pembangunan tidak lagi menjadi domain pemerintah seratus persen, namun juga peran aktif dari *stakeholder* lainya. Hal tersebut selaras dengan paradigma *Governance* dalam ilmu Administrasi Negara dimana upaya membangun sinergitas dalam tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperoleh melalui mendorong sebagian peran pemerintah kepada kelompok lainya yang juga merupakan elemen penting dalam pembangunan.

Selanjutnya, konsep *Collaborative Governance* menjadi penyempurna dalam konsep *Governance* dimana seluruh institusi atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses

pelaksanaan atau kebijakan suatu program harus dilibatkan secara Konsensus atau kesepakatan dalam perumusan dan partisipatif dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Maka dari itu, hasil dari sebuah kebijakan dan program menjadi tanggung jawab bersama (Putu Nomy Yasintha, 2020).

Namun kesenjangan konseptual terjadi karena belum ada penjelasan yang komprehensif bagaimana kolaborasi itu diwujudkan mulai dari proses awal hingga tercapai sebuah kesepakatan bersama secara permanen. Wanna dalam tulisanya yang berjudul *collaborative government : meanings, dimensions, drivers and outcomes* menegaskan bahwa dalam collaborative governance tidak melihat kolaborasi sebagai suatu proses, kolaborasi diartikan sebagai sesuatu yang terjadi karena terciptanya hubungan yang saling menguntungkan untuk membuat Kerjasama. Wanna menunjukkan intensitas hubungan kolaborasi dari mulai yang paling rendah bersifat inkremental dan berupa hubungan yang bersifat konsultatif hingga sampai tingkatan yang paling tinggi yang bersifat transformatif yang bisa menimbulkan resiko manajemen ataupun politik. Model dari Wanna ini tidak menjelaskan atau mengemukakan bagaimana kolaborasi terbentuk dengan melalui intensitas yang berbeda.

Kemudian Ansell dan Gash (2007) membuat model kolaborasi yang lebih menegaskan pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dalam suatu sistem organisasi diluar negara yang membutuhkan adanya prasyarat berupa partisipasi dari masyarakat. Kolaborasi yang dimaksudkan dapat terwujud apabila masyarakat berpartisipasi secara aktif. Adapun bentuk siklus kolaborasi dilakukan dalam bentuk dialog tatap muka yang menimbulkan rasa percaya di semua pihak untuk kemudian menumbuhkan sebuah komitmen Bersama pada proses yang akan dilakukan. Dari komitmen tersebut diharapkan dapat dicapai shared pengetahuan untuk mencapai hasil (*outcome*) yang diinginkan. Model dari Ansell dan Gash tidak mengemukakan terkait intensitas yang akan dicapai dalam proses kolaborasi namun menyebutkan hasil yang akan dicapai.

Dari kelemahan kedua teori utama tersebut maka perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut tentang bagaimana membuat model collaborative governance yang didasarkan pada keeratan hubungan antara pihak yang berkolaborasi dengan berdasarkan proses transformasi agar mencapai keadaan yang permanen. Adapun model yang dikembangkan tentu saja dengan melihat bagaimana proses yang terjadi dan berlangsung saat ini dengan

melibatkan sector public, swasta serta masyarakat. Dengan penggunaan model collaborative governance akan diperoleh kejelasan mengenai peran dan pola hubungan yang bersifat setara dan otonom, saling berbagi manfaat dan resiko, adanya penggabungan sumberdaya, intensitas tinggi dan berlaku dalam jangka waktu yang Panjang (Dwiyanto, 2012:256)

Selaras dengan upaya mencapai konsep *Collaborative Governance* yang optimal, Desa Wisata Kertosari pernah meraih penghargaan *Indonesia Sustainable Tourism Award Festival* Tahun 2019 mengalahkan beragam destinasi wisata terkenal di seluruh Indonesia dengan kategori pelestarian lingkungan (<https://travel.kompas.com/read/2019/111038927/inilahpemenang-indonesia-sustainable-tourism-festival-2019>).

Penghargaan ini diraih dikarenakan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat Desa Kertosari. Melalui kolaborasi antar aktor tersebut terciptalah lingkungan yang aktif dalam membangun pariwisata desa. Oleh karena itu, Collaborative governance yang terbangun di Desa Wisata menjadi kekuatan dalam membangun dan bangkit setelah menghadapi pandemi yang sempat membuat destinasi ditutup dalam kurun waktu sekitar dua tahun.

Melalui hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sejak terjadinya pandemi, peran pemerintah daerah belum maksimal dan menunjukkan keterbatasan kapasitasnya dalam mengelola pariwisata sebagai akibat pandemi, pemerintah daerah kabupaten Pasuruan sebenarnya masih disibukkan dengan upaya pemulihan kehidupan masyarakat yang terkena dampak pandemi seperti yang tertera dalam Peraturan Bupati Pasuruan nomor 66 tahun 2021 tentang rencana kerja dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten pasuruan tahun 2022. Begitupun dengan masyarakat yang banyak beralih profesi menjadi buruh pabrik untuk menyambung kehidupan mereka.

Namun setelah di terbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) pada bulan Agustus 2021 boleh dibuka kembali, Desa Wisata Kertosari yang masuk dalam kategori level dua diijinkan untuk melakukan kegiatan kepariwisataanya kembali. Adapun jumlah kunjungan wisatawan setelah diperbolehkannya membuka kembali Desa Wisata Kertosari adalah sebagai berikut :

Table 1.1. Data kunjungan wisatawan 2020 Desa Wista Kertosari (DWK)

Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa setelah diijinkannya pembukaan

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN 2021 DESA WISATA KERTOSARI (DWK):							
No	Bulan	Destinasi wisata					Total
		kampung buah tin	Randuwana	Rafting	Win Agro	Embung Gusar	
1	Januari	CLOSE COVID-19	CLOSE COVID-19	CLOSE COVID-19	CLOSE COVID-19	CLOSE COVID-19	
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September	19	61	28		33	141
10	Oktober	9	45	Close covid		45	99
11	November	17	71	Close covid		51	139
12	Desember	23	82	65		85	255
	JUMLAH	68	259	93		214	634

Kembali pariwisata pada bulan Agustus 2020, Desa Wisata Kertosari menerima kunjungan wisatawan dengan total 634 kunjungan dimulai dari bulan September hingga Desember 2020 yang menunjukkan bagaimana Desa Wisata Kertosari bisa mengatasi dampak pandemi.

Studi yang dilakukan oleh Kokoh dan Meiranawati (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata oleh BUMDES di Desa Kertosari banyak melibatkan stakeholder, namun masih ditemukan kurangnya partisipasi dari masyarakat sekitar sehingga saran yang diberikan oleh penelitian ini adalah dengan meningkatkan komunikasi yang baik, musyawarah yang bersifat terbuka agar seluruh lapisan stakeholder bisa terlibat aktif dalam kepariwisataan.

Demikian juga dalam peraturan Bupati Pasuruan No. 66 Tahun 2021 tentang pariwisata yang secara detail menyebutkan adanya tata ruang untuk desa wisata yang belum optimal, padahal fungsi dari tata ruang adalah untuk dasar dalam penyusunan RPJM desa agar desa tidak dihadapkan dengan permasalahan lingkungan dan sumber daya alam nantinya. Fungsi tata ruang kedua adalah untuk meminimalisir konflik berbagai kepentingan yang bisa merugikan banyak pihak dan dapat merusak lingkungan. Ketiga

adalah selama ini RT dan RW hanya disusun oleh pemerintah Kabupaten dengan cara hanya membagi antara wilayah pedesaan dan perkotaan, namun tidak sampai pada unit teritorial pedesaan (Agustina, 2020).

Dari kondisi kepariwisataan yang seperti ini sudah seharusnya pemerintah untuk mengkaji ulang beberapa asumsi dasar yang dipakai dalam kebijakan pengembangan kepariwisataan dan memasukkan pariwisata berkelanjutan berbentuk Desa Wisata dalam isu strategis perencanaan pariwisata Kabupaten Pasuruan. Hal ini sangat mendesak untuk dilakukan karena situasi internal maupun eksternal yang berubah sedemikian cepatnya dan perubahan yang terjadi adalah menyangkut pada isu-isu yang sangat fundamental dan strategis dalam pengelolaan sektor pariwisata dimana asumsi dasar yang dipakai selama ini dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pasuruan adalah suasana aman, nyaman serta kondusif untuk melakukan perjalanan wisata, padahal kondisi saat sekarang ini Negara Indonesia adalah Negara yang terdampak akibat pandemic covid -19.

Dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance* diharapkan dapat dijelaskan bagaimana proses transformasi kolaborasi dilakukan untuk membuat hubungan diantara stakeholder bisa permanen. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana *collaborative governance* terjadi, bagaimana peran stakeholder yang terlibat serta bagaimana strategi dalam tata Kelola pariwisata di Desa Wisata Kertosari dengan mengangkat judul “ **Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata kertosari** ”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Desa Kertosari?
2. Bagaimana peran *stakeholder* dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di Desa Kertosari?
3. Bagaimana strategi tata Kelola pariwisata berkelanjutan melalui *collaborative governance* di Desa Kertosari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Memberikan hasil Analisa dan deskripsi efektivitas *dari collaborative governance* dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di Desa Kertosari.
2. Mendeskripsikan peran seluruh *stakeholder* dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di Desa Kertosari.
3. Menganalisa strategi sekaligus faktor pendukung keberhasilan tata Kelola pariwisata berkelanjutan melalui *collaborative governance* di Desa Kertosari.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penelitian bagi studi Ilmu Administrasi Publik tentang *collaborative governance* yang menggunakan teori model kolaborasi oleh Gray dalam Ansell dan Gash (2007:15) sebagai perkembangan tahapan tata Kelola pariwisata berkelanjutan di Desa Kertosari.

2. Manfaat praktis

a. Pemerintah Desa Kertosari

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk memberi bahan rujukan dan masukan kepada instansi pemerintah terkait dalam upaya pembuatan kebijakan dan keputusan mengenai strategi tata Kelola pariwisata berkelanjutan Desa Wisata Kertosari yang lebih baik setelah terdampak pandemi.

b. POKDARWIS

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal memberi masukan dan solusi kepada POKDARWIS Desa Kertosari dalam pembangunan tata Kelola pariwisata berkelanjutan supaya Desa Wisata Kertosari mampu beradaptasi dengan pergeseran arah pariwisata pasca pandemi.

c. Pihak swasta



Meningkatnya kesadaran dan kemampuan dari pihak swasta dalam menjalin serta membantu dalam mengembangkan tata kelola pariwisata di Desa Kertosari adalah harapan yang ingin diwujudkan oleh peneliti.



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dijelaskan diatas terkait dengan collaborative governance dalam tata Kelola pariwisata berkelanjutan di Desa Kertosari adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat bagaimana tingkat efektivitas collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Desa Kertosari , maka bisa dilihat melalui tahapan – tahapan menurut Ansell dan Gash yakni tahap pertama melalui starting condition yang terdiri dari *Power-Resource-Knowledge Asymmetries, incentives for and constraints on participation, prehistory of cooperation or conflict* dimana masyarakat menolak akan ide gagasan pemuda yang ingin membangun dan mengembangkan Desa Kertosari menjadi desa wisata.

Namun seiring berjalanya waktu masyarakat mulai membuka ruang dialog dengan pemuda dan wisatawan terkait desa wisata. Tahapan kedua melalui kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) dimana Pokdarwis Randuwana, pemerintah Desa Kertosari serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan memberikan kontribusinya dengan membantu dalam proses dialog, musyawarah agar seluruh stakeholder yang terlibat mempunyai tujuan yang sama.

Tahapan ketiga melalui Desain kelembagaam (*institutional design*) dimana terbentuklah Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Randuwana melalui surat keputusan Kepala Dinas Kabupaten Pasuruan No 556/ 30.3/ 424.090/ 2018 yang berfungsi sebagai wadah resmi dalam pengelolaan wisata. Tahap keempat melalui Proses kolaborasi (*collaborative process*) dimana terjadi dialog antarmuka (*face to face dialogue*), membentuk kepercayaan (*trust building*), *commitment to process*, serta hasil sementara (*intermediate outcomes*) yang dalam hal ini seluruh stakeholder yang terlibat memenuhi seluruh proses kolaborasi.

Dari seluruh tahapan collaborative governance yang di sebutkan oleh Ansell dan Gash, collaborative governance di desa Wisata Kertosari dapat dikatakan baik dan efektif karena telah melalui seluruh tahapan dan mendukung teori oleh Ansell dan Gash.

2. Dalam rangka mengetahui Peran stakeholder dalam tata Kelola pariwisata berkelanjutan menurut Nugroho (2014) disebutkan bahwa peran POKDARWIS Randuwana adalah sebagai coordinator, implementer, fasilitator sekaligus akselerator. Masyarakat Desa Kertosari berperan sebagai implementer. pemerintah Desa Kertosari yang berperan sebagai fasilitator sekaligus coordinator dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan yang berperan sebagai policy creator, fasilitator, implementer, dan koordinator. Adapun melalui peran dan fungsi tersebut, seluruh stakeholder sudah melakukan peran dan fungsinya.
3. Untuk menganalisis Strategi tata kelola pariwisata berkelanjutan melalui collaborative governance di Desa Kertosari , digunakanlah analisis SWOT dengan hasil bahwa diperlukanya membangun dan melengkapi kebutuhan pariwisata, meningkatkan even pariwisata, dan mengembangkan atraksi wisata sebagai bentuk mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Streght-Opportunities (SO). Dalam meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang Weakness-Opportunities (WO) maka perlu dilakukan penggandengan pihak swasta dan meningkatkan promosi wisata. Adapun strategi alternatif yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi beragam ancaman Strength-Threats (ST) adalah dengan mengoptimalkan potensi alam dan keunikan Desa Wisata Kertosari dan menggelar festival pagelaran budaya. Sedangkan strategi alternatif dalam meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman Weakness-Threats (WT) adalah dengan Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta Melakukan pengawasan dan pemeliharaan fasilitas.

Oleh sebab itu, jika dalam konsep pariwisata terdapat : 1. tahapan collaborative governance yang efektif meliputi starting condition, kepemimpinan fasilitative, desain kelembagaan dan proses kolaborasi . 2. peran dan fungsi stakeholder yang terdiri dari policy creator, coordinator, fasilitator, implementer, akselerator. 3. Strategi tata Kelola pariwisata yang terdiri dari kekuatan,kelemahan, peluang, dan ancaman, maka akan tercapai tata kelola pariwisata yang berkelanjutan melalui collaborative governance.

5.2. SARAN

5.2.1. SARAN PRAKTIS

Setelah beragam ulasan runtut terkait collaborative governance di Desa Wisata Kertosari, maka dalam rangka mendukung pengembangan Desa Wisata diusulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pengelola Desa Wisata Kertosari

a. Membuka jaringan lebih luas

Tim pengelolah Desa Wisata Kertosari secara proaktif diharapkan agar membuka jaringan seluasnya kepada seluruh stakeholder pariwisata berkelanjutan agar mampu meningkatkan kapasitasnya sebagai Lembaga yang otoritatif. Karena dengan adanya Lembaga yang kuat maka tim pengelolah Desa Wisata Kertosari bisa menjadi agen transformasi untuk mencapai kolaborasi yang sempurna.

2. Bagi Masyarakat Desa Kertosari

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata

Masyarakat yang mempunyai peran dan fungsi sebagai implementer diharapkan bisa lebih meningkatkan peranya seperti dengan memberikan fasilitas homestay kepada wisatawan.

3. Bagi pemerintah Desa Kertosari

a. Memberikan otoritas pengelolaan pariwisata

Pemerintah Desa Kertosari diharapkan memberi otoritas penuh kepada tim pengelolah Desa Wisata Kertosari untuk melakukan penataan sekaligus pengelolaan secara professional dengan melibatkan sumber daya manusia yang mampu (*capable*)

4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

a. Meningkatkan dukungan pemberdayaan masyarakat Desa Kertosari.

Dukungan harus tetap dijaga agar proses pemberdayaan terus berlanjut, dengan melakukan beragam kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan wisata desa. Seperti dilakukanya kegiatan pelatihan memasak untuk ibu-ibu agar mampu membuat dan menciptakan sebuah produk inovasi khas Desa Wisata Kertosari agar peran ditiap elemen tetap berkesinambungan.

b. Peningkatan fasilitas pariwisata dan promosi wisata

Pembangunan kelengkapan fasilitas diharapkan mampu dilakukan dengan digandengnya elemen swasta dalam penambahan modal. Elemen swasta ini bisa dari perusahaan sekitar Desa Kertosari. Kemudian promosi wisata bisa dilakukan dengan menawarkan paket wisata kepada instansi dan sekolah. Selain itu media partner seperti influencer bisa digandeng untuk mengenalkan Desa Wisata karena mereka mempunyai pengikut yang cukup banyak.

c. Alokasi anggaran untuk pendampingan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan diharapkan bisa mengalokasikan anggaran terkait program dan kegiatan untuk pendampingan pada tim pengelolah Desa Wisata Kertosari baik menyangkut pengembangan sumber daya manusia ataupun tata Kelola organisasi

5.2.2. SARAN TEORITIS

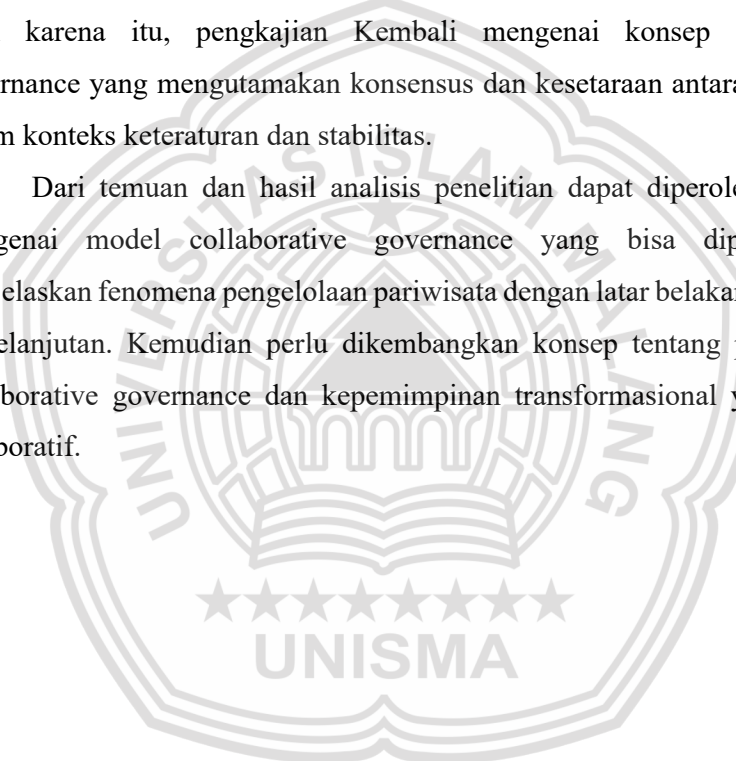
Adapun rekomendasi teoritis yang bisa disampaikan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat membuka wawasan dan cakrawala baru dalam menggunakan pendekatan collaborative governance pada fenomena non linier ataupun pada kondisi yang tidak normal serta sulit untuk diprediksi. Seperti dengan mengembangkan konsep dari Haris dalam Afrida (2017) yang menyajikan prinsip pariwisata berkelanjutan dengan indikator sebagai berikut :

1. Keberlanjutan lingkungan yaitu dengan pemeliharaan sumber daya, ekosistem, pencegahan pencemaran lingkungan dan pemulihan ekosistem atau sumber daya alam yang rusak serta meningkatkan kapasitas sekaligus memelihara integritas tatanan lingkungan.
2. Keberlanjutan ekonomi yaitu terkait dengan barang dan jasa yang dihasilkan dapat memelihara keberlanjutan. Keberlanjutan ekonomi makro, meningkatkan

efisiensi public, mobilisasi tabungan domestic, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, peningkatan distribusi pendapatan dan aset serta pengembangan sumber daya manusia. Dengan begitu, keberlanjutan ekonomi yang spesifik dan terarah dengan sumber daya alam yang ekonominya dapat dihitung harus dilakukan kapital yang tangible.

3. Keberlanjutan sosial yaitu mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan termasuk fasilitas Kesehatan, Pendidikan, gender dan akuntabilitas politik. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat local, peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan, distribusi yang adil dan efektif, mempertahankan keaneragaman budaya, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektifitas dan lingkungan keluarga, serta memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, pengkajian Kembali mengenai konsep collaborative governance yang mengutamakan konsensus dan kesetaraan antara stakeholder dalam konteks keteraturan dan stabilitas.

Dari temuan dan hasil analisis penelitian dapat diperoleh gambaran mengenai model collaborative governance yang bisa dipakai dalam menjelaskan fenomena pengelolaan pariwisata dengan latar belakang pariwisata berkelanjutan. Kemudian perlu dikembangkan konsep tentang pelebagaan collaborative governance dan kepemimpinan transformasional yang bersifat kolaboratif.



DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, Basuki. 2018. *Kebijakan pembangunan sadar wisata menuju daya saing pariwisata berkelanjutan*. Malang : Intrans Publishing.
- Anwas, oos.2014. *pemberdayaan masyarakat di era global*. Bandung: alfabeta,cv
- Cahyani, Alfin dwi.2021. *Analisis SWOT dalam proses pengembangan objek wisata pantai Lombang di Kabupaten Sumenep*. Jurnal Pendidikan Geografi.
- [Chris, Ansell and Gash Alison. 2007.](#) *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access published. University of California, Berkeley.
- Dwijayanti, Arie Pangestu. 2009. *Pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial terhadap pemahaman akuntansi*. Skripsi fakultas ekonomi. Universitas pembangunan nasional “veteran” Jakarta.
- Handayani, Fitri, Hardi Warsono. 2020. *Analisis peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang*. Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro
- Marlina, Nina. 2017. *Tivitas program pengembangan destinasi pariwisata di kabupaten Ciamis (studi pada objek wisata Situ lengkong)*. Jurnal administrasi Negara. Volume No.1,Agustus
- Moeloeng, Lexy j.2004. *Metodologi penelitian kualitatif*.Bandung: PT.remaja Rosdakarya
- Murphy, J.1990.*Principal Instructional Leadership*. In Ls.Lotto
- Pantiyasa, I wayan. 2018. *Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based Tourism) dalam pemberdayaan masyarakat studi kasus di Desa Bedudu Blah Batuh,Gianyar*. STBI Denpasar
- Poli and agustinus, S, Purnomo. 2006. *Suara hati yang memberdayakan. Gagasan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Jayapura, Makassar* : pustaka refleksi
- Prochaska, Jams O and Diclemente, carlo C . 1983. *Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change*. Journal of consulting and clinical psychology. Vol 51,no 3, 390-395
- Rahim, Firmansyah.2017. *Sapta pesona panduan kelompok sadar wisata*. Jakarta : Direktorat jenderal pengembangan destinasi pariwisata kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
- Rangkuti, Freddy. 2014. *Analisis SWOT Teknik Pembeda Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sari, dan kagungan,D.2016. *kebijakan pengembangan kawasan wisata bahari berbasis kearifan lokal dan penguatan kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. Jurnal ecosains, 14 (1),88-104
- Steers, M.Richard.1985. *efektivitas organisasi*. Jakarta:Erlangga
- Sugiyono .2016. *metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

- Wahab, Salah.1994. *pengantar ilmu pariwisata*. Dalam Oka A.Yoeti
- Wanna, John, 2008, “*Collaborative government: meanings, dimensions, drivers and outcomes*”, Janine O’Flynn and John Wanna, Collaboratif Governance, A new era of public policy in Australia, Canberra: ANU E-Press.
- Wibowo. 2006. *Managing change. Pengantar manajemen perubahan*. Bandung .Alfabeta
- Wibowo, Choirul Bayu Aji. 2018. *pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan objek wisata greencanyon sungai Gethuk di Desa Socokangsi,jatinom,Klaten*. Jurnal pemberdayaan masyarakat
- Pemerintah Indonesia. 2005. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata*. Kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan*. LN. 2009/ No. 11, TLN NO. 4966, LL SETNEG : 40 HLM. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah*. LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437, LL SETNEG : 115 HLM. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-undang (UU) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. LN. 2004/ No. 126, TLN NO.4438, LL SETNEG : 44 HLM. Jakarta
- Kementerian Pariwisata. 2016. *Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. Kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif. Jakarta
- Kompas : *inilah pemenang Indonesis sustainable Tourism Award Festival 2019*. 20 Maret 2022, <https://travel.kompas.com>

